

Saat Alam Menagih: Krisis Ekologi sebagai Krisis Moral dan Spiritual Bangsa

Awal tahun 2026, peringatan mengenai cuaca ekstrem kembali muncul. Hujan deras, angin kencang, dan risiko banjir terjadi di berbagai wilayah. BMKG merilis peta potensi cuaca ekstrem yang menunjukkan sebaran ancaman ini hampir merata di seluruh Indonesia. Di saat yang bersamaan, pada musim kemarau dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan terus berulang, terutama di kawasan gambut. Kita sering menyebut semua ini sebagai "bencana alam". Namun, banyak di antaranya muncul akibat keputusan manusia: cara kita membuka lahan, mengelola hutan, memperlakukan sungai, dan menekan ruang hidup demi proyek yang cepat.

Oleh karena itu, krisis ekologi tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis lingkungan. Krisis ini juga merupakan krisis moral dan spiritual bangsa. Kerusakan alam bukan hanya disebabkan oleh kurangnya alat, tetapi karena kita membiarkan nilai benar-salah menjadi kabur. Kita terbiasa menganggap alam sekadar objek ekonomi. Hutan dipandang sebagai sumber kayu, tanah sebagai komoditas, dan laut sebagai ruang kosong. Ketika cara pandang ini mendominasi kebijakan dan perilaku sehari-hari, kerusakan menjadi hal yang normal, bahkan dianggap sebagai "biaya pembangunan".

Tanda krisis moral terlihat dari cara kita menilai untung dan rugi. Kita dengan mudah menghitung laba jangka pendek, tetapi lalai dalam menghitung luka jangka panjang. Ketika banjir datang, kita menyalahkan hujan. Ketika asap menutupi langit, kita menyebutnya sebagai musibah musiman. Padahal, data dan laporan menunjukkan pola yang berulang: tata kelola lahan dan sumber daya yang lemah membuat bencana mudah terjadi. Sistem resmi pemantauan kebakaran hutan dan lahan bahkan mencatat perhitungan luas kebakaran berdasarkan citra satelit dan verifikasi lapangan sebagai bagian dari kontrol negara, tetapi kebakaran tetap berulang dari tahun ke tahun. Artinya, masalahnya bukan hanya ketiadaan

informasi, melainkan pilihan: apakah informasi itu kita gunakan untuk mencegah, atau hanya untuk mencatat setelah kerusakan terjadi.

Krisis moral juga terlihat ketika kepentingan kelompok kecil mengalahkan keselamatan bersama. Kerusakan lingkungan hampir selalu lebih dulu dialami oleh kelompok rentan: warga di tepi sungai, petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat. Mereka paling dekat dengan sumber daya, tetapi paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar. Dalam banyak kasus, warga hanya merasakan dampak: air tercemar, gagal panen, atau penyakit akibat polusi. Pada titik ini, ekologi bertemu dengan keadilan. Jika bangsa membiarkan beban krisis jatuh pada yang lemah, bangsa tersebut sedang kehilangan kompas etik.

Lalu, mengapa ini disebut krisis spiritual? Karena spiritualitas bukan hanya soal ritual, tetapi juga cara manusia memaknai hidup, hubungan, dan tanggung jawab. Ketika manusia memutuskan hubungan batin dengan alam, ia menjadi mudah merusaknya. Jika tanah tidak lagi dipandang sebagai titipan, melainkan sebagai target eksploitasi, maka keserakahan akan muncul. Jika sungai tidak lagi dianggap sebagai sumber kehidupan, melainkan sebagai saluran limbah, maka rasa hormat akan hilang. Spiritualitas yang sehat menghasilkan sikap cukup, hemat, dan peduli. Sebaliknya, krisis spiritual menghasilkan gaya hidup rakus dan cepat, yang kemudian mendorong produksi sampah, konsumsi energi berlebihan, serta pembukaan lahan tanpa kendali.

WALHI, misalnya, menyoroti gambaran krisis lingkungan yang berawal dari kebijakan di “hulu” dan berakhir pada bencana ekologis di “hilir”. Pesannya jelas: masalah lingkungan tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan keputusan politik, tata ruang, penegakan hukum, dan keberanian negara untuk melindungi ruang hidup. Namun, tanggung jawab tidak berhenti pada negara. Bangsa adalah gabungan dari kebijakan dan kebiasaan. Jika masyarakat terus mengejar murah dan cepat tanpa memperhatikan dampak, krisis akan terulang dalam bentuk baru.

Oleh karena itu, solusi yang diambil juga harus mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Pertama, kita perlu mengembalikan etika dasar: tidak mengambil lebih dari yang diperlukan, dan tidak memindahkan risiko kepada orang lain. Prinsip ini tampak sederhana, namun dampaknya sangat besar jika diterapkan sebagai pedoman dalam kebijakan dan bisnis. Kedua, kita harus memperkuat rasa tanggung jawab kolektif. Banjir, asap, dan cuaca ekstrem bukanlah masalah yang hanya dihadapi oleh "daerah tertentu". Gangguan pada rantai pangan, kesehatan, dan ekonomi pada akhirnya akan mempengaruhi semua orang. Ketiga, kita perlu membangun budaya kejujuran mengenai sebab dan akibat. Jika kerusakan terjadi akibat kelalaian, maka kita harus menyebutnya sebagai kelalaian, bukan sebagai takdir.

Pada tingkat tindakan, bangsa ini dapat memulai dari langkah-langkah yang jelas: memperketat perlindungan terhadap kawasan rawan, menegakkan peraturan mengenai pembukaan lahan, dan memastikan bahwa peringatan cuaca ekstrem diikuti dengan langkah-langkah mitigasi yang nyata. Peta potensi cuaca ekstrem tidak boleh hanya menjadi informasi di layar, tetapi harus diubah menjadi kesiapsiagaan di lapangan. Pada saat yang sama, masyarakat dapat memperbaiki kebiasaan mereka: mengurangi sampah, menghemat energi, memilih produk yang tidak merusak hutan, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan ruang.

Krisis ekologi pada akhirnya menuntut pertanyaan yang paling mendasar: nilai apa yang ingin dijunjung oleh bangsa ini? Jika kita memilih nilai yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa batas, maka bencana akan menjadi hal yang biasa. Namun, jika kita memilih nilai yang memuliakan kehidupan, maka pemulihan dapat dimulai. Alam tidak sedang "marah". Alam sedang menunjukkan akibat dari tindakan kita. Ketika alam menuntut, seharusnya nurani bangsa ini memberikan jawaban, bukan berdiam diri.